PENGARUH PDRB DAN TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

SIRILUS BYRON
NIM. B1011211002

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Sirilus Byron
NIM	: B1011211002
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Progam Studi	: Ekonomj Pembangunan
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh PDRB Dan Transfer Pusat Ke Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).
Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak,

(Sirilus Byron)
NIM.B1011211002

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	: Sirilus Byron
NIM	: B1011211002
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Progam Studi	: Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	: 25 Februari 2026
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh PDRB Dan Transfer Pusat Ke Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak,

(Sirilus Byron)
NIM.B1011211002

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh PDRB dan Transfer Pusat Ke Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Sirilus Byron
B1011211002

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	25 Februari 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Muz'an Sulaiman, S.E., M.M, CIQaR NIP 196108241987031003	8/5/26	
2.	Ketua Penguji	Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. NIP 196509211993031001	6/5/26	
3.	Anggota Penguji	Romi Suradi, S.EI., M.E. NIP 198610022019031004	5/5/26	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 04 JUN 2026
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan, dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta motivasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjugpura Pontianak.
4. Bapak Muz'an Sulaiman, S.E., M.M,CIQaR selaku Dosen Pembimbing sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan selesai.
5. Bapak Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas akademika yang telah membagikan banyak ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan penulis.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, terkhusus Bapak Emanuel Sandang dan Ibu Theresia serta Abang Paulus Igas/keluarga dan Abang Agakhan Olga/keluarga hingga Keluarga besar Dinasti YasTeng yang selalu memberikan ilmu, pengalaman, doa, kasih sayang, dan dukungan hingga privilege dalam bentuk materi dan non materi serta nilai spiritual, dan semangat yang luar biasa kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis yang luar biasa, Glen Andrio Sinulingga, Julia, Sartika dan Fani Damayanti yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
10. Teruntuk sahabat baik yang lucu tiada duanya, Denis Fidelis Calvin, Yenia Kania, Maria Rafana Triyanti dan Lina Febrianti yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat serta hiburan yang luar biasa kepada penulis.
11. Teruntuk sahabat sefrekuensi, Rendy Liu, Padizah Marianti, Dhea Aristia, Antonia Fujiastuti Gayu, Veronika Rini Aryanti, Adven Christian Farel, Dayro Carolus Barus, Albrikus, Vinsensius Dadi Kurniawan, dan Bagas Simuslium yang telah memberikan penulis dukungan, doa dan semangat serta hiburan bagi penulis.
12. Teruntuk Sahabat kecil penulis Pakpak Squad terutama Mario Oktavianus, Carolus Ensoh, Natashya Aurellya Prachelly, dan Putri Aulia Wulandari yang telah memberikan kehangatan dan menemani penulis dalam suka maupun duka serta kebersamaan hingga keluh kesah dan penghiburan juga semangat yang luar biasa.
13. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini walaupun pada akhirnya tidak mencapai garis finish yang sama dengan teman lain, Terima kasih untuk tidak menyerah sehingga dapat bertahan sampai saat ini untuk usaha yang luar biasa ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

PENGARUH PDRB DAN TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

SIRILUS BYRON

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Central Government Transfers to Regions on Local Own-Source Revenue (PAD) in districts/cities of West Kalimantan Province during the period 2019–2023. The implementation of regional autonomy requires local governments to

increase fiscal independence through the optimization of local revenue sources. GRDP reflects regional economic performance, while central government transfers are intended to support regional fiscal capacity. This research uses a quantitative approach with panel data regression analysis using EViews 12. The data used are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The model used in this study is the Fixed Effect Model (FEM), which was selected through model selection tests including the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test. The results of the study show that GRDP has a positive but not significant effect on Local Own-Source Revenue (PAD) in districts/cities of West Kalimantan during the study period. This indicates that increases in regional economic output do not always directly increase local government revenue due to the structure of regional taxation and the dominance of sectors whose taxes are collected by the central government. Meanwhile, Central Government Transfers to Regions have a positive influence on PAD, indicating that fiscal transfers from the central government contribute to strengthening regional fiscal capacity. The coefficient of determination (R^2) is 0.9564, meaning that GRDP and Central Government Transfers can explain 95.64 percent of the variation in PAD, while the remaining 4.36 percent is explained by other variables outside the model. These findings indicate that although economic growth is important, the effectiveness of regional revenue management and fiscal policies also plays a crucial role in increasing regional financial independence.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, Central Government Transfers, Local Own-Source Revenue, Regional Finance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto Daerah (PDB) dan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2019–2023. Implementasi otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. PDB mencerminkan kinerja ekonomi daerah, sedangkan transfer pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendukung kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan EViews 12. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Efek Tetap (FEM), yang dipilih melalui uji seleksi model termasuk Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji LM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah Daerah (PAD) di kabupaten/kota Kalimantan Barat selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi regional tidak selalu secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah daerah karena struktur

perpajakan regional dan dominasi sektor-sektor yang pajaknya dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD, menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal regional. Koefisien determinasi (R^2) adalah 0,9564, artinya PDB Regional Bruto dan Transfer Pemerintah Pusat dapat menjelaskan 95,64 persen variasi dalam PAD, sedangkan sisanya 4,36 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi penting, efektivitas manajemen pendapatan daerah dan kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Daerah Sendiri, Keuangan Daerah.

[1] b1011211002@student.untan.ac.id

PENGARUH PDRB DAN TRANSFER PUSAT KE DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KALIMANTAN BARAT

Oleh : SIRILUS BYRON

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura, Indonesia

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Penelitian ini membahas pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Transfer Pusat ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019–2023. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk

meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. PDRB digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan transfer pusat menjadi sumber pendanaan penting bagi daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa struktur ekonomi masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Walaupun PDRB mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap PAD belum optimal karena sebagian besar pajak dari sektor tersebut dikelola pemerintah pusat. Selain itu, transfer pusat masih mendominasi pendapatan daerah sehingga ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan Transfer Pusat ke Daerah terhadap PAD serta melihat sejauh mana kedua variabel tersebut memengaruhi kemandirian fiskal daerah di Kalimantan Barat.

2. Tujuan Penelitian

1) Mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
2) Mengetahui pengaruh Transfer Pusat ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3) Mengetahui pengaruh PDRB dan Transfer Pusat ke Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2019–2023 pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Variabel dependen dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independennya adalah PDRB dan Transfer Pusat ke Daerah. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi EViews 12 dengan model regresi data panel.

Untuk menentukan model terbaik digunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah dilakukan pengujian, model yang paling sesuai adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Persamaan regresi menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap PAD, tetapi tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,6978 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Ketidaksignifikan pengaruh PDRB terhadap PAD disebabkan karena struktur ekonomi Kalimantan Barat masih didominasi sektor primer yang sebagian besar pajaknya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya, peningkatan aktivitas ekonomi daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan PAD secara langsung.

Sementara itu, Transfer Pusat ke Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,0167. Dana transfer dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang akhirnya mendukung peningkatan PAD. Secara simultan, PDRB dan Transfer Pusat ke Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9564 menunjukkan bahwa 95,64% variasi PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Transfer Pusat ke Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan secara bersama-sama kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga efektivitas kebijakan fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

Saran yang diberikan yaitu pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, mengembangkan sektor ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap PAD seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana

transfer pusat. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi daerah, jumlah penduduk, dan belanja pemerintah daerah agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRACT v
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
1 PENDAHULUAN 1
2 KAJIAN LITERATUR 4
2.1 Landasan Teori Pendapatan Daerah 4
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 4
2.1.2 PDRB 8
2.1.3 Transfer Pusat Ke Derah 9
2.1.4 Hubungan Antara PDRB Terhadap PAD 9
2.1.5 Hubungan Antara Transfer Pusat Ke Daerah Terhadap PAD 10
2.2 Kajian Empiris 10
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 11
2.3.1 Kerangka konseptual 11
Hipotesis Penelitian 11
3. METODE PENELITIAN 11
3.1 Bentuk Penelitian 11
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 12
3.3 Data 12
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 12
3.4.1 Variabel Penelitian 12
3.4.2 Definisi Oprasional 12
3.5 Metode Analisis Data 13
3.5.1 Uji Model 14
3.5.2 Uji Hipotesis 14
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1 Hasil Penelitian 15
4.1.1 Uji Penentuan Model Regresi Data Panel 15
4.1.2 Analisis Regresi Data Panel 16
4.1.3 Hasil Uji Hipotesis 17
4 Pembahasan 18
4.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Deerah Di Kab/Kota Kalimantan Barat 18
4.2.2 Pengaruh Transfer Pusat Ke Daerah Terhadap Pendapatan Asli Derah Di Kab/Kota Kalimantan Barat 19
5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI 20
5.1 Simpulan 20
5.2 Saran 20

DAFTAR PUSTAKA 22
LAMPIRAN 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD Kab/Kota Kalimantan Barat 2019-2023 2
Tabel 2Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab/Kota Kalimantan Barat 2019-2023 3
Tabel 3Transfer Pusat Ke Derah Di Kab/Kota Kalimantan Barat 2019-2023 3
Tabel 4Jenis dan Tarif Pajak Provinsi 5
Tabel 5Jenis dan Tarif Pajak 6
Tabel 6Definisi Oprasional 12
Tabel 7Hasil Uji Model 15
Tabel 8Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model 16
Tabel 9Hasil Uji t Statistik 17

Tabel 10Hasil Uji f Statistik 17
Tabel 11Hasil Uji R-square 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual..... 11

1 PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi fiskal tersebut adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara konseptual, PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Richard Musgrave (1959), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam teori ini, kemampuan daerah dalam menggali PAD menjadi ukuran penting tingkat kemandirian fiskal.

Namun dalam praktiknya, tidak semua daerah memiliki kapasitas ekonomi dan fiskal yang sama. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Struktur ekonomi tersebut berimplikasi pada pola penerimaan daerah, di mana sebagian besar potensi pajak dari sektor-sektor tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya, meskipun aktivitas ekonomi meningkat, kontribusinya terhadap PAD belum tentu optimal.

Salah satu indikator utama yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan output wilayah seharusnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas basis perpajakan. Dalam konteks keuangan daerah, peningkatan PDRB secara teoritis akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, sehingga berdampak positif terhadap PAD.

Selain itu, dalam model *Circular Flow of Income*, pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut atas aktivitas rumah tangga dan perusahaan. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, maka aliran pendapatan dan transaksi ekonomi juga meningkat, sehingga penerimaan pajak berpotensi bertambah. Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan positif antara PDRB dan PAD.

Namun demikian, teori tidak selalu sejalan dengan kondisi empiris. Peningkatan PDRB tidak secara otomatis meningkatkan PAD apabila struktur pajak daerah tidak mampu menangkap potensi ekonomi yang berkembang. Hal ini menjadi penting untuk diuji secara empiris, khususnya pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda-beda.

Di sisi lain, sumber utama pendapatan daerah tidak hanya berasal dari PAD, tetapi juga dari Transfer Pusat ke Daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Transfer ini merupakan bagian dari mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal.

Menurut teori desentralisasi fiskal yang dikembangkan oleh Wallace E. Oates (1999), transfer antar pemerintah (intergovernmental transfers) bertujuan untuk menjamin pemerataan pelayanan publik dan mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Namun, dalam praktiknya, besarnya dana transfer dapat menimbulkan fenomena *flypaper effect,* yaitu kondisi ketika dana transfer lebih mendorong peningkatan belanja daerah dibandingkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD. Di banyak daerah, termasuk di Kalimantan Barat, proporsi transfer pusat masih lebih dominan dibandingkan PAD dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan apakah transfer pusat memiliki pengaruh terhadap PAD, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan antara PDRB dan PAD melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi dan basis perpajakan, serta hubungan antara Transfer Pusat ke Daerah dan PAD dalam kerangka desentralisasi fiskal. Namun, hubungan tersebut perlu dibuktikan secara empiris karena setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, dan struktur pendapatan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis pengaruh PDRB dan Transfer Pusat ke Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2019–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan transfer fiskal berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada data ini dapat melihat peningkatan PAD, PDRB, dan Tranfer Pusat Ke Derah di setiap tahunnya.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD Kab/Kota Kalimantan Barat 2019-2023

KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	148.846.279.607	129.676.504.956	148.139.103.732	167.639.410.303	230.889.069.498
Bengkayang	51.957.359.827	54.405.431.384	62.813.127.692	76.613.381.571	82.011.588.604
Landak	92.870.330.406	104.639.964.531	97.868.093.745	73.275.180.942	62.613.089.144
Mempawah	87.577.542.983	98.615.210.566	96.153.931.297	154.466.054.038	148.988.046.415
Sanggau	117.494.362.216	117.923.983.193	129.732.909.424	147.327.186.568	159.171.289.955
Ketapang	195.238.357.272	231.283.286.170	291.004.278.720	225.476.782.345	286.702.600.430
Sintang	172.275.979.701	134.829.357.444	176.520.346.650	162.321.282.202	172.973.442.069
Kapuas Hulu	79.977.091.078	79.165.077.924	78.657.172.950	70.668.853.866	73.407.843.893
Sekadau	45.360.926.218	46.978.872.151	45.142.191.528	49.957.906.237	60.051.351.166
Melawi	40.577.160.351	30.872.004.587	56.170.124.296	43.673.906.224	38.091.491.806
Kayong Utara	28.597.868.471	39.525.271.732	34.406.954.864	39.750.935.658	49.623.846.691
Kubu Raya	172.839.464.395	151.009.789.228	160.894.591.483	165.145.769.699	173.803.381.922
Kota Pontianak	478.790.894.895	403.176.698.952	413.401.936.270	537.797.747.855	574.760.971.716
Kota Singkawang	166.200.436.090	154.272.914.307	175.464.901.487	213.790.179.584	244.316.898.933

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1 mengenai tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019–2023, terlihat bahwa PAD mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Pada periode awal, sebagian daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, namun pada tahun 2020 terjadi perlambatan bahkan penurunan di beberapa kabupaten/kota sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, perdagangan, serta mobilitas masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan yang sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, PAD kembali menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi daerah. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata antar daerah. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kabupaten/kota dengan basis ekonomi yang kuat dan daerah yang memiliki aktivitas ekonomi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal antar daerah masih belum seimbang dan kemampuan dalam menggali potensi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal masing-masing wilayah.

Tabel 2Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab/Kota Kalimantan Barat 2019-2023

KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	20.529.980.000.000	20.669.990.000.000	22.293.190.000.000	24.386.480.000.000	26.189.880.000.000
Bengkayang	8.645.000.000.000	8.672.730.000.000	9.318.530.000.000	10.322.510.000.000	11.146.310.000.000
Landak	10.546.900.000.000	10.739.190.000.000	11.614.170.000.000	12.775.860.000.000	13.684.300.000.000
Mempawah	8.298.150.000.000	8.545.290.000.000	90.845.100.000.000	9.955.620.000.000	11.075.210.000.000
Sanggau	19.158.570.000.000	19.921.370.000.000	21.678.770.000.000	23.847.060.000.000	24.529.320.000.000
Ketapang	27.488.710.000.000	28.105.900.000.000	30.911.320.000.000	34.313.990.000.000	35.249.160.000.000
Sintang	14.681.420.000.000	14.711.070.000.000	15.749.080.000.000	17.330.400.000.000	18.586.860.000.000
Kapuas Hulu	10.205.700.000.000	10.273.880.000.000	11.071.940.000.000	12.187.100.000.000	13.144.360.000.000
Sekadau	6.432.290.000.000	6.568.790.000.000	7.132.690.000.000	7.884.130.000.000	8.506.340.000.000
Melawi	6.432.290.000.000	6.568.790.000.000	7.132.690.000.000	7.884.130.000.000	8.506.340.000.000
Kayong Utara	4.133.120.000.000	4.206.760.000.000	4.534.090.000.000	4.980.740.000.000	5.375.790.000.000
Kubu Raya	29.105.090.000.000	28.930.520.000.000	31.227.440.000.000	35.341.870.000.000	38.286.160.000.000
Kota Pontianak	38.708.220.000.000	37.648.510.000.000	40.202.360.000.000	44.320.310.000.000	38.286.160.000.000
Kota Singkawang	10.228.390.000.000	10.126.220.000.000	10.877.850.000.000	11.922.120.000.000	12.899.270.000.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 2 yang menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada periode yang sama, terlihat bahwa secara umum PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami perlambatan pada masa pandemi. Peningkatan PDRB mencerminkan adanya pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di masing-masing daerah, yang secara teoritis seharusnya mampu memperluas basis pajak daerah. Dengan meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, dan jasa, pendapatan masyarakat dan dunia usaha juga meningkat, sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ikut bertambah. Namun, apabila dibandingkan dengan data PAD pada Tabel 1, peningkatan PDRB tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan PAD yang proporsional. Beberapa daerah dengan nilai PDRB relatif tinggi belum tentu memiliki PAD yang besar. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme transmisi antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan daerah. Struktur ekonomi Kalimantan Barat yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan menyebabkan sebagian besar pajak yang dihasilkan dari sektor tersebut merupakan pajak pusat, bukan pajak daerah. Akibatnya, meskipun PDRB meningkat, tidak seluruh peningkatan tersebut dapat langsung dikonversi menjadi PAD.

Tabel 3Transfer Pusat Ke Derah Di Kab/Kota Kalimantan Barat 2019-2023

KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	1.513.530.000.000	1.377.700.000.000	1.482.955.548.245	1.413.261.892.307	1.503.038.706.858
Bengkayang	965.190.000.000	865.630.000.000	884.358.559.102	926.211.220.637	1.102.292.873.044
Landak	982,050.000.000	974.260.000.000	1.079.332.127.438	1.162.875.513.776	1.162.679.270.371
Mempawah	856,880.000.000	788.620.000.000	815.179.816.601	822.176.564.243	836.844.000.089
Sanggau	1.393.870.000.000	1.187.280.000.000	1.359.793.528.048	1.331.032.540.276	1.607.412.915.549
Ketapang	1.983,290.000.000	1.838.600.000.000	2.116.575.296.254	1.979.322.862.217	2.219.066.187.606
Sintang	1.651.850.000.000	1.592.770.000.000	1.643.139.650.149	1.532.112.089.170	1.751.080.672.016
Kapuas Hulu	1.657.790.000.000	1.478.330.000.000	1.569.062.082.728	1.375.284.294.638	1.519.215.578.697
Sekadau	737.490.000.000	757.830.000.000	731.988.429.757	739.950.874.001	784.830.424.610
Melawi	1.039.720.000.000	714.360.000.000	960.878.513.632	923.904.293.638	1.042.815.790.281
Kayong Utara	688.270.000.000	635.170.000.000	751.362.794.570	656.566.308.517	703.700.256.403
Kubu Raya	1.227.090.000.000	965.000.000.000	1.197.241.614.864	1.239.807.400.709	1.359.976.347.898
Kota Pontianak	1.002.550.000.000	896.320.000.000	912.754.641.188	979.321.954.301	1.003.571.893.772
Kota Singkawang	664.590.000.000	582.920.000.000	606.276.727.141	650.806.160.720	663.304.822.184

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 3 mengenai Transfer Pusat ke Daerah menunjukkan bahwa komponen transfer, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Selama periode 2019–2023, nilai transfer relatif stabil dan cenderung meningkat, bahkan dalam kondisi ekonomi yang mengalami tekanan akibat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap berperan dominan dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Jika dibandingkan dengan PAD, proporsi transfer pusat jauh lebih besar, yang berarti tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah

pusat masih tinggi. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam konteks kemandirian daerah, karena pemerintah daerah dapat menjadi kurang terdorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD apabila kebutuhan anggaran telah ditopang oleh dana transfer.

Apabila ketiga tabel tersebut dianalisis secara simultan, terlihat adanya hubungan yang kompleks antara pertumbuhan ekonomi daerah, struktur pendapatan daerah, dan kebijakan fiskal pusat. Di satu sisi, PDRB menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, PAD juga meningkat namun tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan PDRB. Sementara itu, transfer pusat tetap mendominasi struktur pendapatan daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan empiris mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta apakah besarnya transfer pusat justru memengaruhi insentif daerah dalam menggali potensi PAD.

Dengan demikian, data pada Tabel 1–3 menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB belum sepenuhnya mampu meningkatkan PAD secara optimal, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi. Fenomena ini menjadi dasar yang kuat bagi dilakukannya penelitian mengenai pengaruh PDRB dan Transfer Pusat ke Daerah terhadap PAD di Kalimantan Barat, guna memperoleh pemahaman empiris tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah.